



**KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
DAN TRANSMIGRASI RI**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
SHARING PENGALAMAN  
TENTANG AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA  
BERSAMA KEPALA DESA, BPD, DAN PERWAKILAN  
MASYARAKAT DESA**

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN  
LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
TAHUN 2021**

## **A. LATAR BELAKANG**

Sistem akuntabilitas sosial di Desa saat ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa. Hal ini disebabkan sering kali Desa dijadikan sasaran bagi para pemangku kepentingan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat serta implementasi penghidupan keluarga berkelanjutan. Sehingga Desa mampu menarik perhatian banyak pihak untuk mengimplementasikan program/kegiatan dengan berbagai jumlah pendanaan dari berbagai sumber.

Seiring dengan realitas tersebut, Undang-Undang Desa memandatkan masyarakat Desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Karenanya, warga Desa sejatinya berhak meminta kepala Desa mempertanggungjawabkan kepada mereka terkait kinerja pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan publik yang adil kepada seluruh warga Desa. Partisipasi masyarakat Desa merupakan kata kunci dari keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Desa yang transparan dan akuntabel.

Berbagai praktik baik sudah dilakukan oleh beberapa desa dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas sosial. Upaya membentuk Desa percontohan dalam pengimplementasian akuntabilitas sosial, Kementerian Desa PDTT bekerja sama dengan mitra pembangunan seperti KOMPAK, Seknas Fitra serta Pekka untuk menyebarkan berbagai praktik baik melalui berbagai program/kegiatan yang mengutamakan terwujudnya sistem akuntabilitas sosial. Oleh karena itu, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan menyelenggarakan sharing pengalaman bersama kepala Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat desa terpilih yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas sosial di Desanya untuk mendapatkan gambaran serta deskripsi implementasi akuntabilitas sosial yang telah berlangsung.

## **A. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan**

- a. Menghimpun data Desa yang sudah mengimplementasikan Akuntabilitas Sosial;
- b. Menggali data dan informasi terkait pengalaman Desa dalam pengimplementasian Akuntabilitas Sosial; dan
- c. Mendapatkan dasar pengembangan penyusunan scorecard akuntabilitas sosial.

### **2. Sasaran:**

Sasaran kegiatan *Sharing Pengalaman Bersama Kepala Desa* tentang Implementasi Akuntabilitas Sosial adalah Kepala Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat Desa yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas sosial.

## **C. OUTPUT DAN OUTCOME**

### **1. Output**

Tersedianya data dan informasi yang bersumber dari Kepala Desa yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas sosial.

### **2. Outcome**

Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat dan sistem akuntabilitas sosial di Desa.

## **D. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup pelaksanaan *Sharing Pengalaman Bersama Kepala Desa* tentang Implementasi Akuntabilitas Sosial dilaksanakan dalam metode daring atau online menggunakan aplikasi zoom meeting dengan mengundang Kepala Desa Terpilih yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas sosial di Desanya.

Rangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan output yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

1. Arahan Kebijakan Implementasi Akuntabilitas Sosial;
2. Sosialisasi tentang Implementasi Akuntabilitas Sosial;
3. Diskusi dan Sharing Pengalaman Kelas per Aktor dari Desa (Kelas Kepala Desa, Kelas BPD, dan Kelas Perwakilan Kelompok Masyarakat)
4. Pleno Hasil Diskusi dan Sharing Pengalaman .

#### **E. NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN**

##### **1. Narasumber:**

Narasumber dalam Kegiatan *Sharing* Pengalaman tentang Implementasi Akuntabilitas Sosial adalah: Koordinator Kelompok Studi Fasilitasi Desa Inklusif dan Desa Adat

##### **2. Fasilitator :**

- a. Tim Kementerian Desa, PDTT;
- b. Tim Kompak;
- c. Tim Seknas Fitra; dan
- d. Tim Penyusun Kerangka Logis Scorecard Akuntabilitas Sosial.

##### **3. Peserta:**

Peserta dalam Kegiatan *Sharing* Pengalaman tentang Implementasi Akuntabilitas Sosial terdiri dari :

- 1). Sekertaris BPD Desa Baruga
- 2). Kelompok Perempuan Desa Pekel Lumajang
- 3). Ketua BPD desa sukadana, Lombok Utara
- 4). POKMAS DESA PEMPATAN, Karangasem Bali
- 5). KEPALA DESA Pempatan, Karangasem Bali
- 6). BPD Sidorejo, DIY
- 7). Ketua BPD Pasirian, Lumajang Jawa Timur
- 8). BPD Akar-akar, Lombok Utara
- 9). kepala desa Karya Jaya, Kutai Kartanegara, Kaltim
- 10). Ketua BPD, Desa Pempatan, Karangasem Bali
- 11). KEPALA DESA Condro, Lumajang Jatim
- 12). Kepala desa Borong Loe, Banteang Sulsel
- 13). BPD Desa Manggala, Lombok Utara NTB

- 14). ketua BPD Karya Jaya, Kutai Kartanegara, Kaltim
- 15). Warga Borong Loe, Bantaeng, Sulsel
- 16). Ketua Bpd desa nipa nipa , Bantaeng Sulsel
- 17). Kepala Dusun Nipa-Nipa, Bantaeng, Sulsel
- 18). Ketua BPD Gucialid Lumajag, Jatim
- 19). Bendahara ppdi disabilitas, Lumajang Jatim
- 20). LURAH / KEPALA DESA Sidorejo, Kulonprogo DIY
- 21). KEPALA KAMPUNG Liman Benawi Lampung Tengah
- 22). Tokoh Masyarakat Desa Malaka, Lombok Utara NTB
- 23). KELOMPOK MASYARAKAT Desa Sidorejo, Kulonprogo DIY
- 24). Kelompok masyarakat Desa Karya Jaya Kutai Kartanegara Kaltim
- 25). Kepala Desa Mauya, Halmahera Utara

#### **F. PROSES PENYELENGGARAAN**

1. Pembukaan;
2. Arahan dan Sosialisasi di Kelas Besar;
3. Diskusi dan Sharing di Kelas Kecil per aktor Desa;
4. Pleno Hasil Diskusi dan Sharing.

#### **G. POKOK-POKOK MATERI YANG DISAMPAIKAN OLEH NARASUMBER DAN DISKUSI PESERTA DIPEROLEH SARAN SERTA MASUKAN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Kementerian Desa, PDTT berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan arah kebijakan Kementerian Desa, PDTT adalah memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Konsekuensi logis dari penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah adanya pembangunan sumber daya manusia.
2. SDGs Desa perlu dilakukan dengan mengedepankan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam empat dimensi utama, yaitu: ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Penerapannya dilakukan dengan berdasarkan ikrar SDGs Global, yaitu No One Left Behind (Tidak Meninggalkan Seorang Pun).
3. Arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa difokuskan pada upaya mengoptimalkan layanan terhadap kelompok miskin dan rentan yang dijabarkan kedalam program/kegiatan prioritas. Kemudian Arah kebijakan pembangunan Desa beserta program/kegiatan prioritas masuk dalam dokumen RPJMDesa.

4. UU Desa mengamanatkan kades berkewajiban untuk melaksanakan tata pemerintahan Desa yang baik yang meliputi prinsip-prinsip: akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oleh karena itu, kades selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa berkewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan Desa secara efektif dan efisien. Selain itu, kontrol dari warga Desa untuk memastikan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa termasuk pemanfaatan anggaran Desa dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelaksana pembangunan Desa. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya prakarsa dan kesukarelaan warga Desa memantau dan mengawasi pemerintahan Desa. Dengan demikian, pemerintahan Desa melakukan pertanggungjawaban sosial atas tindakan dan kinerja mereka dalam mengelola pembangunan Desa.

**H. HASIL DISKUSI PESERTA, MASUKAN DAN SARAN PESERTA SEBAGAI BERIKUT:**

| No. | Peserta                               | Hasil Diskusi   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1.  | Perwakilan dari kelompok tani di Desa | <p>Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.</p> <p>Mayoritas masyarakat di Desa merupakan petani (peternak sapi unggulan ) adapun sapi yang ditenakan yaitu sapi lokal khas Bali. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok petani sapi yang salah satunya yaitu terkendala oleh tidak bisa mengembangkan sapi lain selai sapi khas Bali karena bertentangan dengan Perda.</p> <p>Mayoritas masyarakat di desa tersebut sudah masuk kepada kelompok tani, adapun masyarakat yang belum masuk kelompok itu mengusulkan lewat kadus dan usulan-usulan dari masyarakat dibahas dalam musdes dan dalam musyawarah-musyawarah lain yang ada di Desa. Kelompok masyarakat ini berperan aktif dalam setiap perencanaan dan program-program lain yang ada di Desa, sehingga pemerintah desa dan kelompok masyarakat saling bersinergi dengan baik dalam pembangun Desa.</p> <p>Selanjutnya media yang digunakan dalam menginformasikan perencanaan, program Desa, Lpj Kepala Desa melalui media sosial seperti Whatsapp grup dan baliho.</p> |

| No. | Peserta                                    | Hasil Diskusi   |
|-----|--|---|
| 2.  | (Kadus) di Desa Nipah-nipah                | <p>Ibu Fauziah Ibu Fauziah ini salah satu kadus perempuan yang terlibat aktif menjadi delegasi perempuan dalam Musrembang. Salah satu keterfokusan ibu Fauziah yaitu membahas hal-hal yang berkaitan dengan distabilitas dan lansia. Bahkan jauh sebelum terpilih sebagai kepala dusun, ibu fauziah ini sudah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan distabilitas dan lansia. Fauziah juga mendorong kepada perempuan di Desa Nipah-nipah khususnya Ibu-ibu untuk berperan aktif dalam pembangunan Desa tidak hanya dalam urusan distabilitas dan lansia, tetapi dalam program-program pembangunan Desa yang lain.</p> <p>Kemudian dalam mensosialisasikan program-program tersebut dilakukan di majlis taklim pengajian ibu-ibu. Adapun laporan kegiatan atau program-program tersebut itu dimuat di media Desa, grup whatsapp Desa, Bpd dan baliho.</p> |
| 3.  | perwakilan dari Lumajang                   | <p>Kartini ini salah satu perempuan yang fokus pada permasalahan penyandang distabilitas, dia juga aktif dalam organisasi PPDI (Persatuan Penyandang Distabilitas Indonesia) tingkat Kabupaten.</p> <p>Kegiatan yang dilakukan itu mengadakan rapat bulanan dan pendataan penyandang distabilitas yang mana pendataan penyandang distabilitas ini menjadi kunci dalam program bantuan dari Desa maupun dari Dinas Sosial, karena masih banyak penyandang distabilitas yang tidak mendapat bantuan karena tidak terdata yang disebabkan ketidak terbukaan dikarenakan malu.</p> <p>Bantuan yang diterima dari Desa itu berupa kesehatan dan kaki palsu. Adapun kendala yang dihadapi yaitu belum adanya pelatihan-pelatihan dari Desa untuk membekali penyandang distabilitas untuk kemandirian baik secara ekonomi, pendidikan maupun sector yang lain.</p>                     |
| 4.  | Perwakilan pokman Desa Malaka Lombok Utara | <p>Dalam rangka percepatan perencanaan pembanguna Desa melalui Musrembang yang mengundang seluruh elemen masyarakat. Namun kendala yang dihadapi yaitu tingkat kehadiran dari masyarakat itu sendiri apalagi dari kelompok distabilitas. Akan tetapi dalam mengantisipasi ketidak hadirannya tersebut, pihak BPD melakukan door to door dalam menyerap aspirasi dari masyarakat apalagi yang berkaitan dengan kelompok distabilitas dan anak-anak.</p>  |



| No. | Peserta  | Hasil Diskusi   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>Sistem penyerapan aspirasi ini dilakukan setiap hari melalui buku aduan, selanjutnya ada yang dinamakan pekan aspirasi yang mana kegiatan ini untuk melaporkan aspirasi dari masyarakat. Kemudian ada program skala prioritas APBDES. BPD menyampaikan langsung kepada masyarakat melalui grup whatsapp, baliho dan kepala dusun.</p>  |
| 5.  | <p>perwakilan perempuan Desa Pakel</p>         | <p>Keterfokusan yang dilakukan oleh ibu Muntamah ini dalam hal menyelesaikan persoalan kelompok distabilitas, kelompok rentan dan stunting dan membantu peningkatan ekonomi distabilitas. Terdapat dua kelompok agama di desa pakel yaitu Islam dan Hindu, dalam rangka mensosialisasikan kegiatan atau program tersebut melalui forum-forum pengajian atau Pasamuan (Hindu ) yang mana dua kelompok agama ini terlibat dan undang dalam perencanaan anggaran Desa. Kemudian pihak Desa menyediakan form untuk pelaporan prioritas Desa tentang kesehatan, distabilitas, rentan dan stunting.</p>   |
| 6.  | <p>Perwakilan Desa Karya Jaya (kutai)</p>      | <p>Karya Jaya salah satu Desa yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini menjadi salah satu Desa kawasan Transmigrasi dari tahun 1970 dan memiliki sertifikat pada tahun 1974, akan tetapi pada tahun 1990 hampir sekitar 80% luas wilayah desa itu di klaim oleh kehutanan sehingga berdampak terhadap pengembangan dan ekonomi masyarakat setempat. yang mana itu menjadi kendala karena status lahan yang di klaim oleh kehutanan. Maka ketika mau mengajukan permohonan bantuan itu terhalang oleh persoalan administrasi yang disebabkan oleh status lahan, walaupun mendapat bantuan rutin dari kabupaten dan anggaran dana desa (DD).</p> <p>Proses perencanaan desa sudah berjalan dengan baik melalui rembug RT, Desa dan Musrembangdes dalam hal menyelesaikan program stunting dan balita. Adapun potensi Desa yang bisa dikembangkan itu adalah pengelolaan saluran air bersih.</p> |
| 7.  | <p>Kampung liman benawi kab.Lampung tengah</p> | <p>Untuk Akuntabilitas Kami memulai dari perencanaan pembangunan mengundang berbagai elemen masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah (Musrembang) tiap bulan, kami memberikan informasi sosialisasi melalui medsos</p>   |

| No. | Peserta                                   | Hasil Diskusi   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>facebook, grup whatsapp untuk memberikan informasi perencanaan pembangunan desa. Menindak lanjuti ada juga Musdes untuk menetapkan RPJ, RKP. Selain Musyawarah kami membuka Aspirasi masyarakat lewat life chett whatsapp yang dikelola oleh operator desa. Dan sosialisasi memasang baliho banner di setiap dusun.</p>  |
| 8.  | Kepala Desa Kel Sidorejo Kab.Kulonprogo : | <p>Saya Sutrisno lurah kelurahan Sidorejo akuntabilitas sosial yang kami laksanakan mulai dari perencanaan pembangunan yang menjadikan siklus tahunan pemerintah yang memang wajib harus diselenggarakan dari mulai musyawarah padukuhan, yang mana itu menampung aspirasi dari setiap komponen masyarakat baik itu dari dari kelompok tani, kelompok padukuhan, kelompok difable. Disitulah muncul aspirasi yang akan dibawa ke musyawarah desa, yang mana penduduk kami sekitar 8500 jiwa dari masing-masing kelompok itu masuknya menjadi musyawarah padukuhan, yang akan dibawa ke musyawarah desa tersebut kami kami hadirkan tanya dengan musyawarah desa dari berbagai komponen masyarakat yang dihasilkan untuk merancang pembangunan tahun yang akan datang kemudian menjadi semacam program-program pemerintah kelurahan itu dananya dari apbdes dari provinsi dari pusat seperti dana desa mengerucut kaitanya dengan program kegiatan tahun 2022.</p> <p>Kebetulan bulan Juli ini mau kita laksanakan menampung aspirasi masyarakat dan dilanjutkan dengan perencanaan pembangunan desa sudah mengarah kaitanya dengan pendanaan, jadi sebelum bicara perencanaan dari mana sumber dananya tetapi juga mengingat dengan asal-usulnya seperti dana desa sendiri itu untuk prioritas itu kan sudah ada aturannya nanti masuknya musrenbangdes itu nanti dengan kegiatan dan juga kaitanya tahun yang akan datang. Kami juga sudah mulai dari tahun 2016 di kelurahan kami yaitu sudah mengadopsi mengakses kegiatan-kegiatan yang ada masyarakat penyandang disabilitas, kami punya kelompok difable kelurahan jadi semua anggotanya itu kami jadikan satu dan dibuatkan wadah, pada 2018.</p> <p>Kita sudah membuatkan perdes yang ada di kulon Progo kami sudah membantu tentang penyandang disabilitas dari kelompok itu akan bisa mengakses dari dana desa kaitannya dengan instrument.</p> |

| No. | Peserta                                | Hasil Diskusi   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>Mereka juga bisa mengawal kaitanya dengan pembangunan desa dan kita selalu melibatkan dengan kelompok-kelompok tersebut yang lintas memberikan ruang ke masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengawalan dan evaluasi program kerja pemerintah. Seperti yang disampaikan dari bapak tadi kami sudah implementasikan baiknya yaitu laporan BPD perencanaan pembangunan yang akan datang kemudian laporan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah desa tahun yang lalu, kami infokan kepada masyarakat berbentuk banner terkait program kegiatan atau program kerja pembangunan desa. Kami memasang banner di titik strategis di desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan semua masyarakat bisa mengevaluasi, mengawasi kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat karena bisa mengawal pembangunan desa yang mereka juga rancang sendiri mereka juga bisa melaksanakan dan mengawasi. Alat pertanggung jawaban kami bias di akses di sistem informasi desa (SID).</p> |
| 9.  | Kades dari Provinsi Maluku Utara       | <p>Curhat Kades angkatan Corona 2020 yang mengalami kesulitan karena anggaran dari dana desa baik dari pusat maupun daerah diintruksikan untuk penanganan Covid 19, APBdes dialokasikan untuk visi pemerintah pusat dengan program pembagian BLT yang membuat kesulitan pembangunan desa.</p> <p>Dilakukan musyawarah desa dengan alat bantu sosialisasi banner dan dilakukan sosialisasi melalui rumah ibadah pada hari jum'at dan minggu. Merubah APBdes yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya untuk dialokasikan ke penanganan Covid 19 berupa bantuan BLT.</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat tentang partisipasi bersama membangun desa dan SDM yang rendah.</p>   |
| 10. | Bpk Herman Yasim Kab. Bantaeng :       | <p>Pekan aspirasi yang dilakukan BPD musyawarah BPD lalu Musrembang sehingga akuntabilitas bisa dipertanggung jawabkan.</p>   |
| 11. | Bpk I Nengah suta Kab. Karangasem Bali | <p>Melakukan alat bantu sosialisasi dengan facebook, whatsapp, dan baliho</p>   |
| 12. | Kades Condro                           | <p>Dengan bekerjasama mitra BPD menerima aspirasi</p>   |

| No. | Peserta                        | Hasil Diskusi   |
|-----|--------------------------------|---|
|     | Lumajang                       | masyarakat, musyawarah rutin tiap RT, Musyawarah desa untuk membahas (RKP, APBdes), alokasi di finilo, perencanaan pembangunan desa, realisasi diawasi BPD dan masyarakat sesuai RAB.   |
| 13. | BPD Desa Karyo Jaya :          | Implementasi pembangunan, musrembang bersama karangtaruna, kelompok tani, dan tetua adat 2 kali pertemuan dalam sebulan muskes. Ketua BPD melakukan musrembang tingkat desa dan melakukan RKP prioritas pembangunan. Dan daerah terpilih untuk program desa inklusif. Melakukan sosialisasi dengan banner. Keluhan karena daerah Transmigrasi lama tetapi masih diklaim oleh perhutani karena melanggar LHK.  |
| 14. | Sekjen Seknas Fitra            | BPD Menjadi mitra kerja Kepala Desa untuk pengeloan pemerintahan yang baik di desa, kami berharap semua BPD yang hadir dalam sharing Virtual ini bisa bergagi cerita dengan kami terkait akuntabilitas kepala desa dan transparansi di Desa masing-masing   |
| 15. | BPD Desa Sidorejo              | <p>Di desa sudah memulai kegiatan pembangunan, dalam setiap desa minimal ada 6 perdes yang dihasilkan, sebelum pademi musrembang bisa dilakukan dengan anggota lebih banyak, sesudah pandemic secara komposisi sama tapi secara jumlah berkurang.</p> <p>Mengumpulkan semua aspirasi dari masyarakat terus kita sampaikan ke pemerintah desa itu sebelum pandemic, sesudah pandemic banyak perubahan karena anggaran banyak terserap untuk penanganan covid. untuk transparansi mengenai Dana Desa diumumkan ke public melalui benner atau Baliho yang pasang di beberapa tempat straregis sehingga masyarak bisa melihat.</p> <p>Tambahan; Walaupun BPD di bentuk masyarakat dan menjadi mitra kepala desa hanya dalam ungkapan saja, akan tatapi pada kenyataan tidak demiakian, hal ini karena keterbatasan kewenangan oprasional untuk BPD dalam pengawasan, kami ingin BPD mempunyai regulator yang bisa menguatkan BPD dalam melakukan pengawasan</p> |
| 16. | Arifiddin BPD Desa Nipah-Nipah | Untuk Transparansi 3 tahun belakangan ini cukup bagus dan bisa di pertanggungjawabkan yaitu degan memasang baloho di seluruh titik yang bisa di lihat dan di akses oleh masyarakat desa, semisal di kantor desa, di masjid dan di pertigaan ajalan. selama pandemic Pemerintah desa tetap melibatkan BPD dalam melakukan perubahan anggaran juga unsur masayarakat, juga dalam penyaluran   |

| No. | Peserta                               | Hasil Diskusi  |
|-----|---------------------------------------|--|
|     |                                       | <p>banduan BLT dana desa.</p> <p>Ada juga Trasparansi administarasi dan desa nipah-nipah menjadi juara 1 dalam lomba adminostrasi di Kab. Bantaeng.</p> <p>Dalam melakukan musayawarah semua perangkat desa dilibatkan, (SEKAR) sekolah anggaran desa bisa memberi manfaat yang sangat bagus dengan karena melibatkan perempuan, terdapat 7 dusun perempuan yang kepala dusunnya adalah perempuan.</p> <p>Selain BPD Untuk pengawasan warga juga terlibat secara langsung, karena warga merukan penikmat daripada pembangunan itu, Seperti Pembuatan sumur Bor, dan pembangunan lain yang bisa langsung di saksikan warga secara umum. Komisi perlindungan anak dan perempuan</p> <p>Ada juga musrembang anak,segala info yang di peroleh dari anak di catat dan kita lanjutkan kepda pihak yang berwenang seperti</p> |
| 17. | Ibu Eniyati BPD Menggala Lombok utara | <p>Transparansi seperti MUSREMBANG dengan melibatkan perempuan dan lansia juga ada beberapa keterlibatan mereka sebelum pandemi, setelah pandemic berkurang, refocusing keterlibatan perempuan sebagai RT dan RW.</p>  |
| 18. | I Komang BPD Pempatan Bali            | <p>Desa inklusif ada dua desa yang sama berjalan seperti ibu dan bapak yaitu desa adat dan Dinas, transparansi membuat baliho di setiap banjar kemudian dengan mengundang unsur desa , seperti masyarak difabel, warga kurang mampu , salah satu wujudnya dengan mengangarkan 35% dari anggaran desa. untuk penanganan anggaran selalu berkordinasi dengan desa adat setiap desa adat mendapat 300 juta setiap tahunnya, setiap bulan ada rapat terkait laporan pertanggungjawaban keuangan.</p> <p>Prinsip tanggung jawan sudah pasti terkait dengan dengan nilai, transparasi, akuntabilitas inovativ. Setiap desa adat setiap bulan melukan rapat terkait keluhan masyarakat, setiap keluhan di catat dan di akomodir dengan objektif dengan memandang asa manfaat di tindak lanjuti di musdes</p>                  |
| 19. | Sutam BPD Gucialid Limajang           | <p>Terkait Tranparansi Partsipasi pelaporan kepala desa mempertanggungkan pengguaan keuangan selama satu tahun, di internal BPD yitu melakukan rapat untuk lebih mendalami apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan desa , dimulai rancangan sampai penyusunan APBDES, yakni bagaimana merancang dengan melibatkan pemuda, tokoh agama dan masyarakat dalam</p>  |

| No. | Peserta                     | Hasil Diskusi  |
|-----|-----------------------------|--|
|     |                             | <p>menyusun rencana anggaran desa selama setahun bersama kepala desa kemudian di di bawa ke APBDES, BPD Turun langsung kelapangan untuk meninjau langsung berbagai program yang di lakukakan oleh kepela desa, BPD bersama masarakat masyarakat melakukan pengawasan kinerja kepala desa baik ADD BLT maupun dalam bentuk bangunan BPD Membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk masyarakat mendengarkan keluhan mengenai kebijakan kepala desa</p>  |
| 20. | Anang BPD Pasirian Lumajang | <p>BPD dengan kepala desa adalah mitra, sealu Bersama dalam melakukan perencanaan , Penyusunan dan Pelaksanaan dengan melakukan pertemuan rutin yang menjadi saluran aspirasi, di desa Pasirian terdapat 103 penerima dana BLT, dimana dalam proses penentuan penerima sampai pada tahap pemberian melibatkan RT,RW danpak Kasun, agar tepat sasaran, sebagai tranparansi bebtuk anggran, di desa Pasirian ada juga program rumah Tonggo, Program lumbung desa, dan Keluarga Tangguh untuk menanggulangi Covid 19. Menyampaikan laporan lewat PUSDES dengan melibatkan RT,RW, dan Kasun, selama covid pembangunan belum begitu tampak, ada pun pembangunan desa Wisata yang di bangun.</p> |
| 21. | Nurhayana BPD Baruga        | <p>Pertangujawaban melalui MUSDES, dengan melibatkan sebanyak 9 Kepala Dusun, RT/RW, tokoh masyarakat.</p> <p>Untuk Pengawasan dengan melibatkan BPD BPD juga menampung aduan dari masyarakat yang dituliskan di Baliho juga dengan menyediakan kotak saran, kemudian kita tampung dan kita sampaikan kepala desa.</p>   |
| 22. | Siti Rahmah Lombok Utara    | <p>Secara umum hampir sama dengan desa-desa yang lain mungkin hanya terdapat penambahan sedikit terkait Pelaporan kepala desa H-3 BPD mempelajari terlebih dahulu laporan, membahas, apabila terdapat kesalah pihak BPD menyuruh kepala desa Untuk meperbaiki dulu.</p> <p>Masayarak disini sangat kecil dalam ikut melakukan pengawasan</p> <p>Pada Tahun 2019 di fasilitasi oleh mitra dengan di sedikan sekolah desa, sekolah desa ini sangat membantu kami BPD dalam penguasaan hal-hal teknis melakukan pengawasan</p> <p>Sebelum covid untuk perempuan sudah terlibat dalam partisipasi musyawarah di desa.</p>  |
| 23. | Sriyanto BPD                | BPD bersinergi Bersama kepala desa dalam   |

| No. | Peserta                                 | Hasil Diskusi   |
|-----|---|---|
|     | Desa Karya<br>Jaya Kutai<br>Kartanegara | melaksanakan semua Pembangunan yang dilakukan di desa,<br>Transparansi dengan memasang baliho,<br>Mengundang masyarakat dalam melakukan musawarah desa. |

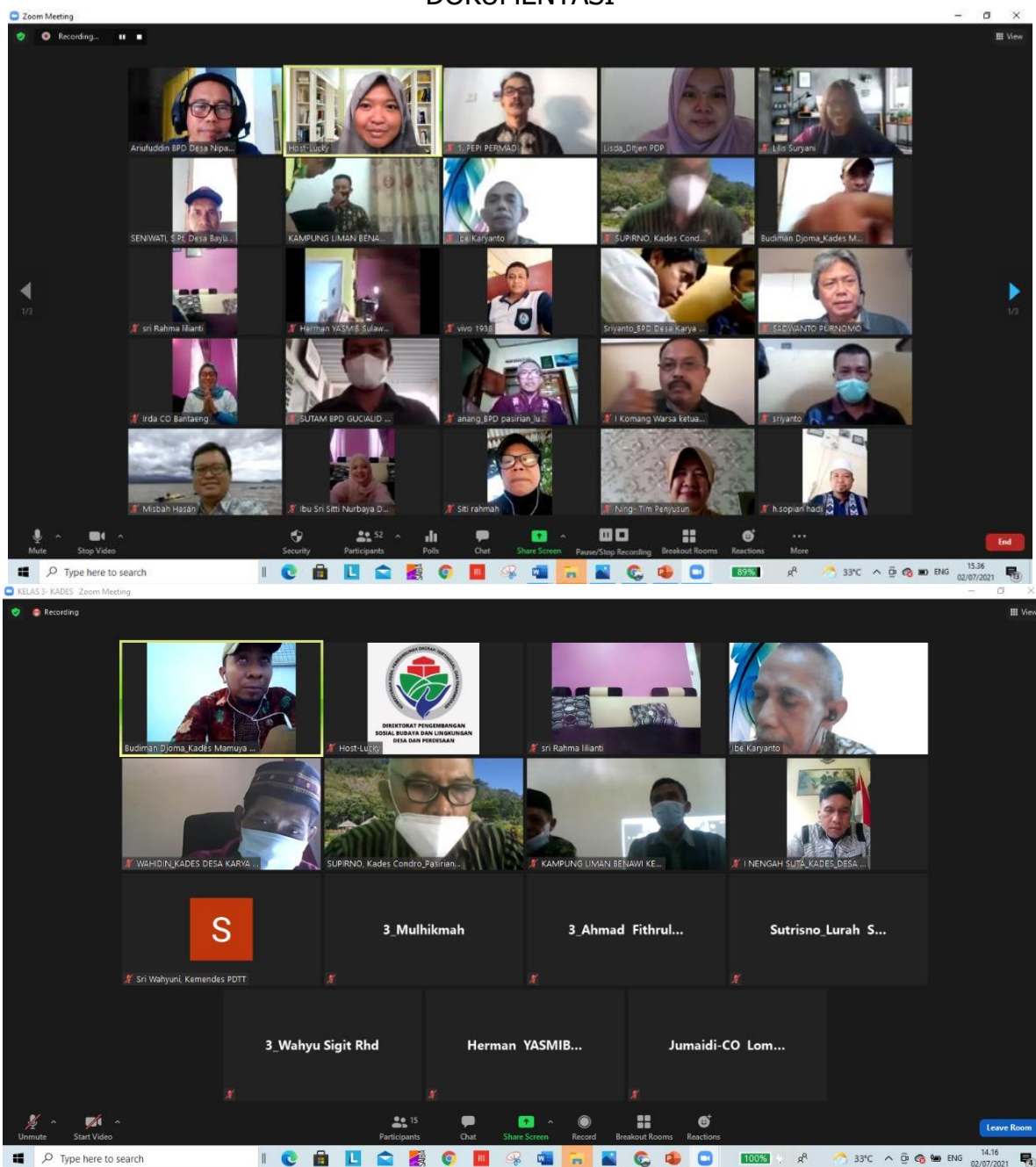
## JADWAL KEGIATAN

### SHARING PENGALAMAN TENTANG IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

| Waktu                     | Uraian Kegiatan/Materi                            | Partisipan  | PIC     |
|---------------------------|---|---|---------|
| <b>Jumat, 2 Juli 2021</b> |   |   |         |
| 12.45 – 13.00             | Peserta Masuk dalam Zoom Meeting                  |   | Panitia |
| 13.00 – 13.05             | Pembukaan   | Ir. Sri Wahyuni<br>Koordinator Desa Inklusif dan Desa Adat  | Panitia |
| 13.05 – 13.30             | Sambutan dan Arahan Pembukaan                     | Ir. Rosyidah Rachmawaty, MM<br>Sekretaris Direktorat Jenderal PDP   |         |
| 13.30 – 13.40             | Briefing dan Pembagian Kelas                      | Fasilitator Utama : Bu Lilis dan Pak Ibe  | Panitia |
| 13.40 – 14.40             | Sharing pengalaman peserta di kelas masing-masing | <p>Kelas 1. Kelompok Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pak Misbah (Seknas Fitra)</li> <li>2. Pak Pepi Permadi (Tim Penyusun)</li> <li>3. Bu Astutik (Tim Penyusun)</li> <li>4. Pak Sulistyono (Tim Penyusun)</li> <li>5. Bu Lisda (Kemendesa PDTT)</li> </ol> <p>Kelas 2. BPD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pak Ibe (Tim Penyusun)</li> <li>2. Bu Ning Harpudiyanti (Tim Penyusun)</li> <li>3. Pak Sadwanto (WB)</li> <li>4. Bu Aprilia (Kemendesa PDTT)</li> <li>5. Pak Jagad (Kemendesa PDTT)</li> </ol> <p>Kelas 3. Kepala Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bu Sri Wahyuni (Kemendesa PDTT)</li> <li>2. Bu Lilis (KOMPAK)</li> <li>3. Bu Kate (WB)</li> <li>4. Pak Badiul (Seknas Fitra)</li> <li>5. Pak Wahyu (Tim Penyusun)</li> <li>6. Bu Lucky (Kemendesa PDTT)</li> </ol> |         |
| 14.40 – 15.00             | Pleno di kelas utama                              | Fasilitator Utama : Bu Lilis dan Pak Ibe  |         |
| 15.00 – selesai           | Penutupan   |   |         |



# DOKUMENTASI



Recording

You are viewing Mirbah Hasan's screen

View Options

View

### Pendalaman Aspek Partisipasi

- Bagaimana cara Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Program/Kegiatan/Anggaran Desa?
- Apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu turut melakukan pengawasan pembangunan desa?
- Bagaimana cara/mekanisme masyarakat di desa bila ada keluhan terkait pembangunan?

Zoom Meeting

Unmute Start Video

Participants 18

Chat

Share Screen

Record

Breakout Rooms

Reactions

Leave Room

Recording...

Host-Lucky is talking...

Kartini disabilitas kum...

Nurhayana EPd Desa B...

Wakdi: EPD SIDOREJO...

3\_FITRA:Adul Hadi...

Sri Wahyuni, Kemendes P...

Muntamah Desa Pakel...

Eniyati: BPD Menggala...

Jagad Wiksono

3\_Wahyu Sigit Rhd...

Jumaldi: CO Lombok U...

Hendriadi: FITRA NTB...

Supanda

LC FITRA Lumajang Gin...

Bahari: co fitra Lumajang

Ahdiut Supriatni

Hajariah, Desa Akan-Akar

WAHIDIN:KADES DESA...

Abdul Muiz

3\_Ahmad Fithrul Mubin

3\_Muhammad...

sriyanto

Makhrufah PLD...

Fithya Firdie

Fauziah, A. Ma D...

agus

Type here to search

33%

33°C

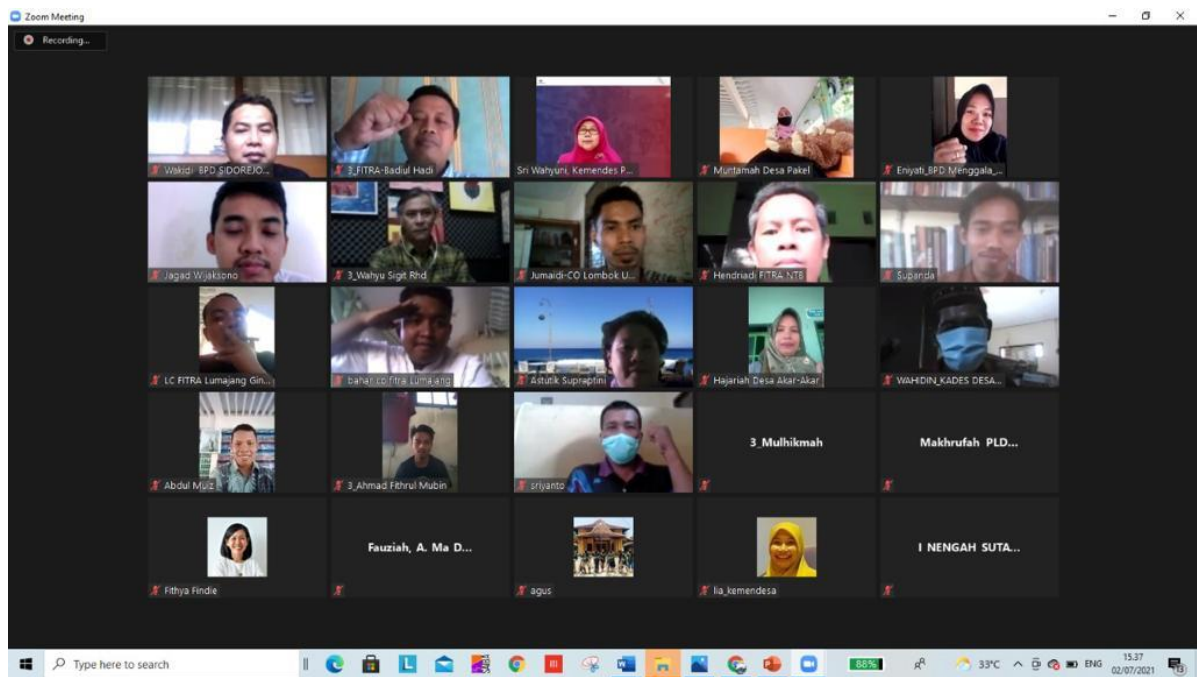
ENG

15:36

02/07/2021

Zoom Meeting

Recording...



|                          |                         |                            |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Wakid: BPD S DOREJO...   | 3 FITRA Badial Hadi     | Sri Wahyuni, Kemendes P... | Muhammad Desa Pakel     | Enyeth, BPD Menggala... |
| Jagad Wijaksana          | 3 Wahyu Sigit Rhd       | Junaldi-CD Lombok U...     | Hendradi FITRA NTS      | Supanda                 |
| LC FITRA Lumajang Gin... | Bahan CO FITRA Lumajang | Aditun Supraptini          | Hajariah Desa Akar-Akar | WAHIDIN_KADES DESA...   |
| Abdul Mujib              | 3 Ahmad Fehrul Mubin    | sriyanto                   | 3 Mulhikmah             | Makhrufah PLD...        |
| Fithya Firdie            | Fauziah, A. Ma D...     | agus                       | la_kamendesa            | I NENGGAH SUTA...       |

Type here to search

88% 33°C 15:37 02/07/2021